



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Batal Bebaskan 118 Bidang Lahan

Terkait Efisiensi Anggaran

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan sebanyak 118 bidang lahan di empat kelurahan di Ibu Kota di sekitar bantaran Sungai Ciliwung tahun ini.

Alasannya Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan efisiensi anggaran menyusul ditundanya pemberian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp 6,4 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan, ratusan lahan itu tersebar di empat kelurahan yakni Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang. Awalnya DKI telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 160 miliar untuk pembebasan lahan itu, namun karena anggaran terancam defisit, maka rencana itu dibatalkan. "Iya dibatalkan semua, jadi rencana normalisasi Sungai Ciliwung juga tertunda," ujar Juaini, Senin (11/11).

Juaini mengatakan, tahun ini Dinas Sumber Daya Air memiliki anggaran pembebasan lahan Rp 850 miliar untuk normalisasi kali dan waduk. Dari pagu itu, anggaran yang sudah terserap mencapai Rp 350 miliar.

Tidak terganggu

Sementara sisanya Rp 500 miliar belum diserap, termasuk rencana pembebasan 118 bidang lahan milik warga di bantaran Sungai Ciliwung. Meski tahun ini dibatalkan, namun kegiatan itu telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara



DISKUSI — Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh (kiri) dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Yusmada Faizal berdiskusi sebelum rapat kerja dimulai pada Senin (11/11).

Ricky Martin Wijaya

(KUA-PPAS) untuk APBD 2020 senilai Rp 600 miliar.

Adapun duit sebanyak itu juga dialihkan untuk pembebasan lahan pembangunan waduk ataupun normalisasi kali lainnya. "Jadi beberapa anggaran yang mungkin dianggap tidak bisa kami laksanakan tahun 2020, ya kami kurangi, karena pembebasan lahan kami masuk-an lagi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Juaini juga yakin program pengendalian banjir yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan terganggu. Lembaganya sudah menyiapkan berbagai upaya dalam menanggulangi ancaman banjir di antaranya mengeruk sungai, waduk, hingga mengerahkan satuan tugas (Satgas) pengendali banjir di setiap kelurahan.

"Sebenarnya *nggak* terlalu signifikan juga karena memang sungainya sudah ada. Nanti BBWSCC juga akan memasang *sheetpile* supaya air tidak meluap ke permukiman warga," jelasnya. **(faf)**

Normalisasi Ciliwung Dipastikan Tertunda

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Hidayah, memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung tidak akan terlaksana bila 118 bidang lahan di sana tidak dibebaskan. Bahkan lembaganya juga tidak akan membangun *sheetpile* untuk mengantisipasi luapan air di sungai alam tersebut. "Kesepakatannya bahwa pembebasan lahannya oleh Pemprov DKI Jakarta dan kami menormalisasi sungai tersebut," kata Bambang, Senin (11/11).

Meski demikian, kata Bambang, aliran Sungai Ciliwung di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan se-

panjang 1,5 kilometer tetap dinormalisasi. Soalnya pembebasan lahan itu sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak 2018. "Untuk yang 1,5 kilometer tetap kami normalisasi 2020 nanti. Anggarannya sekitar Rp 25-30 miliar," ujarnya.

Menurutnya, walau DKI membebaskan 118 bidang lahan itu di tahun 2020, lembaganya tetap tidak bisa menormalisasi sungai alam itu pada 2021. Kemungkinan, normalisasi itu baru bisa dilakukan pada 2023.

"Kalau dilakukan di 2020 (pembebasan) berarti kami mengusulkan di tahun 2022 kalau begitu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yang kami terima pun (data pembebasan 1,5 km) di bulan April-Mei saat pembebasan 2018," jelasnya. **(faf)**